



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/3724>

POLITIK BERAS DAN GERAKAN SOSIAL: RESISTENSI PETANI UNRA SULAWESI SELATAN MASA KEPENDUDUKAN JEPANG 1943

Moch. Dimas Galuh Mahardika¹, Fahmi Nur Ramadhan²

Universitas Sebelas Maret

E-mail: dimas.dg20@gmail.com, fahminr11@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima Juli 2020, Disetujui Agustus 2020, Dipublikasikan September 2020

Abstrak

Dalam rangka mendukung upaya Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menerapkan kebijakan mobilisasi massa dan sistem “politik beras” atau wajib serah padi secara paksa terhadap petani di Indonesia. Implikasi politis dari kebijakan ini adalah terjadinya perubahan sosial pada masyarakat pedesaan seperti perubahan struktur otoritas tradisional di Sulawesi Utara. Penerapan sistem politik beras ini juga membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Ada dua faktor utama penyebab terjadinya pemberontakan, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Perlakuan kasar penagih setoran kepada warga desa dan perilaku kekerasan aparat polisi ketika melakukan inspeksi ke desa Unra dalam rangka melakukan penagihan kewajiban setoran beras kepada warga. Selain itu, penyebab tidak langsung ialah adanya penetapan kewajiban setor beras dari pemerintah pendudukan Jepang kepada petani, yang kuotanya 500 liter per kepala rumah tangga. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya perlawanan rakyat di pedesaan, terutama di daerah-daerah lumbung beras seperti yang terjadi di desa UNRA pada tahun 1943. Gerakan pemberontakan petani UNRA ini dipimpin seorang tokoh agama bernama Guru Mante.

Kata Kunci: Politik beras, Pemberontakan, Unra

Abstract

In an effort to win over the Pacific War, the Japanese imposed a massive mobilization policy and a system called “rice politic” which means a forced mandatory to hand over the rice upon the Indonesian peasants. The political implication of this policy is that there occurred a social change within the rural community such as the transformation of the traditional authority structure in Northern Sulawesi, which also causes more suffering to the Indonesian people. There are two main factors of the uprisings, the direct and indirect factors. The oppressive attitude of the rice collector toward the villagers and police’s violence when they were inspecting the Unra village to demand them of the mandatory rice deposit toward the villagers. Other than that, the indirect action is that the stipulation to deliver the rice of at least 500 liters per household from the Japanese occupation government upon the peasants. These factors that incite the rebellions in the rural community, especially in areas where there are a lot of rice barns such as in UNRA village in the year 1943. The UNRA peasant’s revolt was led by a religious figure whose name Guru Mante.

Keyword: *Rice politics, resistance, Unra*

PENDAHULUAN

Perang Asia Timur Raya diawali dengan penyerbuan Pearl Harbour pada 7 Desember 1941. Dalam peperangan tersebut, Jepang lebih memfokuskan usahanya untuk menguasai Asia Pasifik sebagai sasaran utama yang akan dijadikan sebagai lahan kehidupannya. Untuk memenuhi tujuan itu, Kekaisaran Jepang harus berhadapan dengan Amerika Serikat di wilayah koloni Filipina, Perancis penjajah Indo China, Inggris di Singapura, dan Belanda di Indonesia (Suryanegara & Ahmad Mansur, 2010). Dalam usaha untuk memenangkan Asia Timur Raya, Jepang membutuhkan banyak sekali kebutuhan perang termasuk barang-barang logistik yang pada saat itu kebutuhan logistik Jepang masih sangat kurang (Ningrum dkk., 2017; Oktorino, 2016).

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang berhasil menaklukan pemerintah Belanda dan menduduki Indonesia (Ricklefs, 2007; Vickers, 2005). Pada awal kedatangannya di Indonesia, Jepang menyampaikan tujuannya untuk membebaskan penduduk pribumi dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, reaksi awal penduduk pribumi terhadap penyerbuan Jepang tidak begitu buruk bahkan menyambut kedatangan Jepang. Namun secara perlahan anggapan ini lenyap karena tidak lama setelah kedatangannya, Jepang langsung menerapkan kebijakannya yang bertujuan untuk mengeksploitasi ekonomi secara intensif guna mendukung operasi militer Jepang.

Oleh karena itu, produksi dan distribusi panen serta bahan komoditas ditempatkan di bawah kontrol pemerintah Jepang. Untuk mempermudah kontrol terhadap negeri-negeri yang dijajah, Jepang membaginya atas negara surplus

dan negara minus dalam pengadaan beras. Dalam melancarkan kebijakan ini, pemerintah Jepang membuat berbagai program untuk menarik dukungan dari rakyat. Menurut (Kurosawa, 2015, hlm. 56) dalam menarik dukungan rakyat, Jepang menggunakan berbagai media propaganda dan program-program latihan seperti *Seinendan* (Barisan Pemuda), *Keibodan* (Barisan Keamanan), *Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat) yang dijalankan melalui berbagai kelompok masyarakat kelas bawah.

Pada zaman penjajahan Jepang di Desa Unra, rakyat diwajibkan melaksanakan “wajib setor beras” atau biasa disebut “*Zaman Kuintalan*” karena berasal dari kata *Quintaal*, yang berarti 100 kg (satuan berat yang diperkenalkan oleh Jepang). Para petani juga menyebut zaman ini sebagai zaman penyeteroran padi. Masyarakat diwajibkan untuk menyeterorkan sejumlah padi sebanyak yang telah ditentukan pemerintah Jepang dalam rangka mencukupi kebutuhan untuk perang (De Jong, 1987).

Selain faktor “wajib setor beras”, faktor lain terjadinya pemberontakan petani ialah perubahan struktur otoritas tradisional di pedesaan. Selama pemerintahan pendudukan Jepang, hubungan antara pemerintah lokal, seperti kepala desa, lurah dengan rakyatnya semakin melemah. Tidak lagi terjadi hubungan “*patron klien*” (melindungi dan dilindungi), tetapi justru yang terjadi adalah para kepala desa atau lurah dijadikan wakil pemerintah yang bertugas memerintah secara otoriter dan memaksa rakyat menyerahkan padinya kepada pemerintah pendudukan Jepang (Carey dkk., 2017; De Jong, 1987). Semua kebijakan Jepang ini menyebabkan meratanya kemiskinan

secara luar biasa, perekrutan tenaga kerja pedesaan sebagai *romusha* yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertanian, dan jarak antara berbagai kelompok sosial semakin tajam. Faktor-faktor inilah yang memicu terjadinya perlawanan rakyat di pedesaan, terutama di daerah-daerah lumbung beras, seperti yang terjadi di Desa Unra, Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah (Kuntowijoyo, 2005): (1) penentuan topik; (2) pengumpulan sumber/heuristik; (3) verifikasi; (4) interpretasi; (5) historiografi. Maka dalam penyusunan tulisan ini, penulis berusaha untuk mengikuti prosedur penelitian sejarah seperti langkah-langkah yang telah dijabarkan di atas.

Selain itu, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (Zed, 2004) mengingat sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber yang tersedia di dalam lingkungan perpustakaan. Sehingga analisis teks sangat diperlukan sebagai upaya untuk menafsirkan kembali kajian di dalam sumber yang telah dibaca. Sumber yang digunakan dalam penulisan artikel ini berupa buku dan jurnal yang dianggap relevan dengan tema yang ditentukan oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pemberontakan Petani UNRA

Pemberontakan petani Unra sebagai sebuah gerakan sosial, merupakan gerakan

yang menolak secara menyeluruh penetrasi tertib sosial yang ditawarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang waktu itu. Penolakan ini ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentangnya karena pemerintah dan elite penguasa lokal telah masuk dalam golongan yang memiliki hak-hak istimewa, dan berkuasa dengan sewenang-wenang. Pemberontakan petani Unra terjadi pada tahun 1943 di Desa Unra, Kecamatan Awangpone (Kamaruddin, 2012).

Ada dua faktor utama penyebab terjadinya pemberontakan, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya ialah perlakuan kasar penagih setoran kepada warga desa dan perilaku kekerasan aparat polisi ketika melakukan inspeksi ke desa Unra dalam rangka melakukan penagihan kewajiban setoran beras kepada warga, sebagaimana yang terjadi terhadap Ibanna. Perlakuan kasar penagih setoran dengan menaiki loteng dan membuka paksa bubungan rumah Ibanna untuk mengambil padi dan membuangnya ke tanah telah memicu kemarahan rakyat Unra (Limbu Gau, 1991). Tindakan ini juga telah melanggar norma adat-istiadat dan simbol-simbol budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, yaitu bahwa padi mengandung nilai magis dan tidak boleh dibuang ke tanah karena akan membuat petani sulit mendapatkan pangan atau gagal panen. Penyebab tidak langsungnya ialah adanya penetapan kewajiban setor beras dari pemerintah pendudukan Jepang kepada petani, yang kuotanya 500 liter per kepala rumah tangga.

Faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya pemberontakan petani di Unra pada tahun 1943 adalah sebagai berikut.

1) Faktor Geografis

Desa Unra terletak di bagian utara Kabupaten Bone, masuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Awangpone. Letaknya 15 Kilometer dari ibukota Kabupaten Bone, 185 Kilometer dari Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Unra sendiri memiliki empat dusun, yaitu: Dusun Watang Limpo'E, Dusun Watang Unra, Dusun Pepping'Nge, dan Dusun Amessangeng. Keempat dusun ini terdiri dari hamparan sawah yang luas dan subur. Dengan keadaan fisik dan kondisi daerah yang demikian itulah, Unra sangat menarik bagi pemerintah pendudukan Jepang untuk memobilisasi rakyat yang terdiri dari petani untuk memenuhi ambisi politiknya dalam hal pengumpulan padi atau beras (Hafid, 1997). Letak geografis Unra yang berada di daerah terpencil dalam wilayah kekuasaan kerajaan Bone, dapat menjelaskan tradisi-tradisi mereka sebagai masyarakat dengan watak yang keras dan pembangkang.

2) Faktor Ekologis

Faktor ekologis yang menyebabkan terjadinya pemberontakan petani Unra adalah terjadinya masa paceklik. Petani Unra yang senantiasa hanya tergantung pada belas kasihan sang hujan meskipun sawah menghampar luas, telah mengalami krisis subsistensi yang disebabkan kemarau panjang sehingga banyak penduduk Unra yang hanya mengkonsumsi bonggol pisang. Krisis subsistensi pada masa paceklik, sebagaimana yang terjadi di Unra pada masa pendudukan Jepang telah menyebabkan rakyat sangat sulit memenuhi kebutuhan pangannya dan mengalami gagal panen (Geertz, 1966), ditambah dengan adanya kewajiban secara

paksa untuk menyetor beras kepada pemerintah sebanyak 500 liter tiap rumah tangga petani. Akibat tekanan ini, terjadilah keresahan sosial petani Unra yang berujung pada pemberontakan.

3) Faktor Sosiologis (Keresahan Sosial)

Keresahan yang sudah meluas di kalangan masyarakat itu terwujud dalam sebuah gerakan pemberontakan. Pergolakan yang disertai ambruknya nilai-nilai tradisional ini ditandai oleh ketidakpuasan, suasana tegang, dan keresahan di kalangan penduduk. Keresahan yang meluas di kalangan rakyat Unra bukan hanya kerusuhan-kerusuhan, tetapi juga kejahatan-kejahatan sosial, seperti pencurian, dan perampokan (Hobsbawm, 1971; Hobsbawm, E. J, 2018).

4) Faktor Politik

Dari aspek politik, yang menyebabkan terjadinya pemberontakan adalah perubahan secara dramatis lembaga politik tradisional, seperti lembaga desa. Pemerintahan Jepang tidak segan-segan menyingkirkan aturan-aturan, dan norma-norma politik tradisional yang dijunjung tinggi oleh rakyat (Geertz, 1973). Satu contoh yang jelas, ialah ketika terjadi suksesi kepemimpinan kepala desa di Unra, dimana pemerintah Jepang sering ikut campur di dalam proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa tanpa melibatkan rakyat. Dengan demikian, pemerintah pendudukan telah mengabaikan cara-cara konvensional mengenai pemilihan pemimpin yang berlaku pada masyarakat Unra, yang selalu dijunjung tinggi melalui aturan-aturan adat tradisi, seperti *pangadereng*.

Kondisi Perkonomian Masyarakat Unra Akibat Politik Beras Jepang

Bagi rakyat Unra, tanah merupakan sumber produksi, kebutuhan, dan penda-

patan ekonomi, serta kekayaan utama. Dengan demikian, tanah memiliki arti penting dan merupakan kedudukan yang menjadi prestise tersendiri bagi petani yang memilikinya. Sebagai akibatnya, klasifikasi penduduk desa didasarkan pada kepemilikan tanah (Soediono & Gunawan, 1984). Dalam hierarki desa, golongan pemilik tanah bersama-sama dengan pemerintah lokal yang umumnya juga sebagai tuan tanah menduduki lapisan sosial atas.

Penduduk lainnya yang terdiri dari elite desa diduduki oleh pemimpin agama, seperti haji, kiai, dan unsur nonbirokrat. Adapun penduduk desa yang terdiri dari kebanyakan kaum petani digolongkan ke dalam buruh tani, dan petani kaya atau tuan tanah. Khusus antara kaum petani miskin dan petani kaya ini, pada masa pemerintah kolonial Belanda terjadi hubungan yang menguntungkan, yakni saling ketergantungan dan saling membutuhkan yang dikenal dengan istilah hubungan *patron klien* (Ahimsa, 1988).

Masalah ketergantungan sosial pada masa-masa krisis pangan ketika pemerintah pendudukan Jepang berlangsung di Indonesia, tampak menjadi begitu melemah karena pemerintah pendudukan Jepang memperlakukan petani kaya, petani miskin, petani penggarap, atau buruh tani dengan status yang sama, yaitu memiliki kewajiban yang sama untuk memusatkan perhatiannya pada pengerahan tenaga kerja untuk memproduksi pangan yang sebanyak-banyaknya dan kemudian disetorkan kepada pemerintah untuk kepentingan logistik perang Asia Timur Raya.

Perubahan politik, ekonomi, sosial, dan demografis, yang terjadi sejak masuknya pemerintah kolonial Hindia

Belanda dan Jepang telah mempengaruhi hubungan kekuasaan, dan eksploitasi ekonomi terhadap rakyat di pedesaan (Utami, 2011). Kebutuhan-kebutuhan petani, sebenarnya adalah untuk mempertahankan suatu minimum kalori, suatu biaya penggantian, dan biaya seremonial yang seringkali bertentangan dengan keharusan-keharusan yang dipaksakan oleh pemerintah atau penjajah (Suharko, 2006). Akan tetapi, untuk mendefinisikan petani Unra dalam konteks pemberontakan, khususnya dari segi tata hubungan yang menjadikan mereka tunduk kepada golongan-golongan yang berkuasa, maka, kaum petani terpaksa mempertahankan keseimbangan (Tom, 2005). Pemerintah atau penjajah memandang petani sebagai sumber tenaga kerja murah, dan barang yang dapat menambah dana kekuasaannya. Di samping itu, petani juga adalah pelaku ekonomi (*economic agent*) dan kepala rumah tangga. Tanahnya adalah satu unit ekonomi (Wolf, 1983).

Adanya faktor penghasilan penduduk yang rendah, dan panen yang gagal sebagai akibat dari musim kemarau yang panjang, atau cuaca hujan yang menyebabkan banjir dan rusaknya hasil panen telah membawa efek yang gawat pada kelangsungan hidup penduduk Unra, yang terdiri dari kaum petani. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau di daerah yang demikian timbul pemberontakan dan perlawanan terhadap pemerintah jajahan. Karena faktor inilah, ketika pemerintah pendudukan Jepang berkuasa di Sulawesi Selatan, Unra yang waktu itu gagal panen karena musim kemarau yang panjang, dipaksa oleh pemerintah untuk menyerahkannya, melalui elite penguasa lokal. Akibat

tekanan hidup yang mencekik leher ini, terjadilah keresahan yang berujung pada pemberontakan.

Proses Pemberontakan Petani Unra Di Sulawesi Selatan

Pemberontakan petani Unra diawali dengan sebuah insiden di rumah Ibanna pada tanggal 10 September 1943 (Kamaruddin, 2012). Ibanna adalah salah seorang petani di desa Unra yang belum menyetor semua tunggakan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap penduduk Unra. Hal ini disebabkan Ibanna sudah tidak mampu lagi menumbuk padi karena usianya telah lanjut sehingga tidak dapat memenuhi keinginan pemerintah. Menurut (Limbu Gau, 1991) menyatakan bahwa tiga hari sebelum pemberontakan terjadi, kepala desa Jailing, Andi Mannuhung dan para pengawalinya mendatangi rumah Ibanna untuk mengambil beras. Tetapi, Andi Mannuhung bersama pengawalinya kecewa karena mereka hanya mendapatkan tiga bakul kecil beras yang sudah ditumbuk sehingga utusan Andi Mannuhung tersebut langsung naik ke loteng rumah untuk mengambil padi.

Sebelum mereka mengambil padi, terlebih dahulu mereka membuka bubungan rumah Ibanna sebelah selatan agar mereka mudah mengambil padi yang berada di atas loteng. Padi-padi itu kemudian diambil dan dibuang ke tanah. Kejadian ini disaksikan sendiri oleh Ibanna yang langsung melaporkannya kepada salah seorang keluarganya yang bernama Ipagga. Mendengar laporan itu, Ipagga kemudian pergi ke tempat kejadian. Akan tetapi, kedatangannya membuat suasana semakin panas dan dia sendiri menjadi sasaran kemarahan Andi

Mannuhung beserta para pengawalinya. Salah seorang pengawal, yakni Andi Dambu langsung memukul Ipagga dengan pedang kemudian Ipagga melakukan perlawanan, tetapi ia tidak berdaya dan ditangkap (Kamaruddin, 2012).

Berita tentang insiden tersebut segera tersebar di Desa Unra dan ke perkampungan-perkampungan di sekitarnya. Tidak lama berselang, sejumlah penduduk datang ke rumah Ibanna dan menghadang pasukan Andi Mannuhung agar tidak melarikan diri. Di antara para penduduk yang datang ke tempat kejadian, ialah Hajji Temmale, seorang tokoh masyarakat Unra yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa (Kamaruddin, 2012, hlm. 28). Berkat bantuan Hajji Temmale, rombongan Andi Mannuhung dapat meninggalkan tempat kejadian tanpa menimbulkan korban jiwa.

Pada malam hari setelah terjadinya insiden di rumah Ibanna, rakyat Unra berkumpul di sekitar rumah Ibanna untuk berjaga-jaga agar jangan sampai Andi Mannuhung beserta pengawalinya datang untuk mengambil kembali padi yang telah dibuang dari loteng rumah Ibanna. Untuk itu, penduduk secara bersama-sama mendatangi rumah Guru Mante untuk meminta pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pemerintah yang semakin memberatkan penderitaan rakyat. Menurut (Limbu Gau, 1991, hlm. 13) Guru Mante hanya memberikan saran kepada penduduk Unra, agar mereka pergi ke perbatasan desa antara Unra dan Jaling untuk menghadang Andi Mannuhung beserta pengawalinya. Setelah itu, banyak penduduk siap siaga di perbatasan desa untuk menunggu kedatangan Andi Mannuhung beserta pengawalinya, namun sampai menjelang

pagi mereka tidak muncul sehingga penduduk kembali ke rumah masing-masing.

Pada paginya, penduduk Unra di bawah pimpinan Guru Mante bersepakat mendatangi rumah kepala desa Unra, Andi Satinja, untuk melakukan aksi protes sehubungan dengan tindakan aparat pemerintah terhadap rakyat Unra. Aksi ini terjadi pada tanggal 21 September 1943. Tujuan utama aksi ini ialah untuk menangkap Andi Dambu yang telah memukul Ipagga pada waktu insiden di rumah Ibanna. Namun, tujuan itu tidak tercapai karena Andi Dambu tidak berada di tempat itu. Oleh sebab itu, penduduk Unra semakin marah dan berteriak-teriak memanggil orang-orang yang ada di dalam rumah kepala desa Unra namun tidak ada yang menanggapi. Akhirnya, sebagian penduduk berinisiatif masuk ke dalam rumah, tetapi dicegah oleh Hajji Temmale yang sedang berada di halaman rumah bersama Kulasse dan Meje (Kamaruddin, 2012).

Setelah mengadakan aksi protes di rumah kepala desa Unra, Guru Mante kemudian menyampaikan himbauan dan ajakan (Nagazumi, 1998, hlm. 41):

“...jika kalian masih menganggapku sebagai pemimpin, sebagai keluarga, apalagi sebagai sepupu-sepupuku, dan jika kalian memang tidak mau ikut dalam gerakan dan perjuanganku untuk menentang ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan di bumi UNRA ini, itu berarti kalian sudah memisahkan ikatan darah di antara kita beserta segala yang berkaitan dengan kehidupanku. Untuk itu putuslah hubungan keluarga di antara kita. Bagi mereka yang ingin berpihak dan setia kepadaku, maka mulai malam nanti kuharapkan kalian semua hadir. Sedangkan yang akan ikut tetapi

belum sempat, maka boleh datang kira-kira pukul 8.00 pagi di alun-alun *Abbolang’Nge*”.

Selesai menyampaikan himbauan dan ajakannya kepada penduduk Unra, Guru Mante kemudian menemui Andi Satinja (Kepala Desa Unra) dan Andi Mannuhung untuk bertemu besok pagi di alun-alun *Abbolang’Nge* sebagai penentu siapa yang laki-laki dan siapa yang berada di pihak yang benar.

Andi Satinja yang merasa keselamatan dirinya terancam dan memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya di desa Jaling. Tujuannya untuk meminta perlindungan dari ayahnya Andi Mannuhung dan pemerintah Jepang. Jadi, antara Kepala Desa Unra, Andi Satinja dan Andi Mannuhung ada hubungan antara anak dan Bapak. Andi Satinja adalah anak Andi Mannuhung. Kepergian Andi Satinja ke Jaling di kawal oleh Hajji Temmale, Dullah, dan Meje. Kepergian mereka tidak diketahui oleh penduduk desa Unra.

Sesampainya di desa Jaling, Dullah dan Meje diperintahkan oleh Hajji Temmale agar kembali ke Unra untuk mengantisipasi situasi dan kondisi serta segala kemungkinan yang terjadi. Sementara itu, Hajji Temmale dan Andi Satinja berangkat ke Watampone, ibukota pemerintahan Bone untuk melaporkan kepada kepolisian dan urusan pemerintahan, yaitu Arung Ponceng Andi Abdullah bahwa situasi keamanan semakin panas di Unra. Pada waktu itu juga, Arung Ponceng Andi Abdullah beserta pengawalnya satu regu kepolisian bersenjata api berangkat ke Unra. Di antara rombongan Arung Ponceng, terdapat Andi Patarai selaku Mantri Polisi, Marsuki, Andi Ukkase, Tume Daeng

Pawawo, Beddu, Nara, Pabittei, dan Sangka, masing-masing sebagai polisi.

Rombongan itu tidak langsung menuju desa Unra, tetapi mereka singgah dahulu di rumah kepala desa Jaling untuk beristirahat. Pada dini hari, Rabu, 22 September 1943, baru rombongan tersebut berangkat menuju desa Unra (Limbu Gau, 1991, hlm. 16). Dalam rombongan ini, kepala desa Jaling Andi Mannuhung turut serta. Dalam perjalanan, Hajji Temmale bersama kepala desa Unra Andi Satinja tidak langsung menuju desa Unra, tetapi keduanya menuju desa Cempa untuk menemui Mado Cempa (Kepala Kampung) Cempa. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, karena Mado Cempa diduga berpihak kepadanya dan kepada pemerintah pusat pendudukan Jepang di Watampone. Namun, maksud mereka sia-sia karena orang yang akan ditemuinya tidak berada di tempat.

Pada hari Kamis tanggal 23 September 1943, bertepatan dengan 8 Syawal 1364 H atau seminggu setelah hari Raya Idul Fitri, Arung Pongceng beserta rombongan tiba di Unra untuk mengadakan pemeriksaan sesuai laporan yang diterimanya. Pemeriksaan pertama dilakukan di rumah-rumah penduduk, namun rata-rata rumah penduduk sudah kosong ditinggalkan penghuninya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana persiapan penduduk untuk melakukan pemberontakan menghadapi kekuatan militer Jepang. Selain itu, juga untuk mengetahui di mana rakyat dan pimpinan pemberontak memusatkan pertemuan-pertemuannya dalam menyusun kekuatan.

Setelah mendengar bahwa rakyat Unra memusatkan kekuatannya di alun-alun *Abbolang'Nge* di bawah pimpinan

Guru Mante, aparat kepolisian dan utusan pemerintah menuju ke tempat itu. Suasana makin mencekam dan dua kekuatan tersebut berhadap-hadapan, yakni kekuatan rakyat Unra dan kekuatan aparat kepolisian. Sebelum terjadi kontak senjata di antara kedua belah pihak, datanglah Andi Pananrangi ke tempat kejadian. Kedatangan Andi Pananrangi adalah untuk menjadi penengah agar rakyat Unra mengurungkan niatnya untuk memberontak. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan himbauan agar tidak memberontak namun himbauan itu tidak mempan lagi.

Menurut (Kamaruddin, 2012, hlm. 30) menyatakan bahwa rakyat diperintahkan untuk meletakkan senjatanya berupa badik, pedang, keris, dan tombak secara sukarela. Lagi-lagi himbauan itu tidak diindahkan oleh rakyat.

Seketika itu juga, muncul Andi Mannuhung dan langsung menendang orang yang kakinya pincang sebelah (Ikepo). Melihat perlakuan Andi Mannuhung terhadap Ikepo, rakyat kemudian serentak melakukan serangan terhadap aparat kepolisian beserta rombongan pemerintah yang datang di bawah pimpinan komando Guru Mante. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak, sehingga korbanpun berjatuhan.

Dalam pertempuran itu, Arung Pongceng Andi Abdullah tewas dan kemudian disusul oleh Andi Satinja (Kepala Desa Unra), Andi Mannuhung (Kepala Desa Jaling), dan anaknya sendiri Andi Dambu yang tewas secara bersama-sama. Para pemberontak ini belum puas sampai di situ dan mereka terus melakukan perlawanan secara gencar terhadap aparat kepolisian pemerintah. Hanya sebagian kecil saja dari pihak polisi dan wakil

pemerintah yang tersisa dan melarikan diri dari kejaran pemberontak.

Menjelang dzuhur, pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak pemberontak. Tetapi, kemenangan itu, dirasakan oleh pemberontak hanya bersifat sementara karena mereka menyadari bahwa pasti akan datang serangan balik dari pihak pemerintah karena banyaknya wakil pemerintah dan aparat polisi yang tewas dalam pertempuran itu. Selanjutnya, terjadi situasi yang tidak menentu pasca meletusnya peristiwa pertempuran di *Abbolang'Nge* karena tersebar berita bahwa akan datang pasukan tentara Jepang dari Watampone untuk melakukan penangkapan dan serangan militer terhadap penduduk Unra guna mencari pemimpin pemberontakan. Berita ini disampaikan oleh Hajji Kulasse yang menyarankan agar semua penduduk Unra menyingkir ke luar desa untuk menghindari serangan balik tentara Jepang. Namun, rakyat memilih untuk tetap bertahan dan siap menghadapi segala kemungkinan terburuk.

Berita mengenai meletusnya pemberontakan petani Unra ini juga sampai kepada Raja Bone di Watampone yang segera memerintahkan aparat kerajaan dan dikawal oleh pasukan Jepang untuk segera menuju desa Unra. Sementara itu, pihak pemberontak di bawah pimpinan Guru Mante memusatkan kekuatan penuh dalam persiapan menghadapi kekuatan tentara Jepang yang diperkirakan segera tiba. Pada tanggal 24 September 1943 rombongan aparat pemerintah dan tentara Jepang tiba di Unra dan langsung menuju ke tempat konsentrasi kekuatan pemberontak di *Abbolang'Nge* (Kamaruddin, 2012).

Melihat pemberontak dalam keadaan siap tempur, tentara Jepang melepaskan tembakan peringatan agar para pemberontak menyerah. Namun, hal itu tidak membuat para pemberontak menghentikan perlawanannya bahkan mereka bergerak maju secara serentak menyerang tentara Jepang. Pada saat itulah pemimpin pemberontak Guru Mante dan beberapa pemberontak lainnya gugur di arena pertempuran. Dengan gugurnya pemimpin pemberontak Guru Mante, pimpinan kemudian diambil alih oleh Itipu. Tidak lama sebagai pemimpin baru, setelah kejadian itu Itipu ditangkap oleh tentara pendudukan Jepang dan dibawa ke Watampone kemudian ke Makassar untuk dipenjarakan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Tewasnya pemimpin pemberontak (Guru Mante) mengejutkan semua orang, baik anak buahnya sendiri maupun rakyat Unra yang turut dalam pemberontakan. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah mengetahui bahwa Guru Mante mengajarkan tarekat "*awaraningeng*" atau ilmu kekebalan (Kamaruddin, 2012:30). Setelah kematian Guru Mante mereka tidak yakin bahwa ia tewas tertembus peluru. Akhirnya, seiring dengan waktu tidak ada lagi pemimpin yang karismatis seperti Guru Mante dan berakhirlah pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Unra.

Namun, ketika terjadi pemberontakan di Unra pada 23 September 1943, ada beberapa orang murid Guru Mante dari kampung Kacimpang Desa Ulaweng yang ikut serta membantu petani Unra dalam pemberontakan. Banyak rakyat Unra yang melarikan diri bersama Mappe dari Desa Ulaweng dan di sanalah mereka menyusun kekuatan baru untuk mengada-

kan perlawanan yang lebih terorganisir. Namun, belum sempat mereka menyusun kekuatan, gerakan mereka sudah diketahui oleh Jepang. Penangkapan massal dan penyiksaan oleh tentara Jepang mengakibatkan terjadinya eksodus rakyat UNRA ke luar desa untuk menghindari penangkapan. Untuk menghindari penangkapan, banyak rakyat Unra yang merantau ke negeri seberang, seperti Malaysia, Sumatera, Kendari, Pomalaa, Brunai, dan Tawao (Kamaruddin, 2012).

KESIMPULAN

Banyak faktor yang memicu sebelum meletusnya pemberontakan petani di Unra, Sulawesi Selatan pada tahun 1943. Beberapa faktor tersebut seperti pertama, faktor Geografis dimana desa Unra merupakan daerah hamparan sawah yang luas dan subur sehingga membuat desa Unra sangat menarik bagi pemerintah Jepang untuk memenuhi ambisi politiknya dalam hal pengumpulan padi atau beras. Faktor kedua ialah faktor Ekologis, ketika itu terjadi masa paceklik yang membuat para petani Unra mengalami krisis panen sehingga para petani sangat sulit memenuhi kebutuhan pangannya, ditambah dengan adanya kewajiban secara paksa untuk menyeter beras kepada pemerintah Jepang yang semakin mencekik para petani.

Faktor ketiga ialah faktor Ekonomi, bagi rakyat Unra tanah merupakan sumber produksi kebutuhannya dan pendapatan ekonomi, serta kekayaan utama. Dengan demikian, tanah memiliki arti penting dan merupakan kedudukan yang menjadi prestise tersendiri bagi petani yang memilikinya. Sebagai akibatnya,

klasifikasi penduduk desa didasarkan pada kepemilikan tanah. Namun, pada zaman penjajahan Jepang, petani kaya, miskin, petani penggarap atau buruh tani memiliki status yang sama, yaitu bekerja untuk memproduksi pangan sebanyak-banyaknya dan disetorkan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Faktor keempat ialah faktor Sosiologis, rakyat yang sudah mulai resah terwujud dalam sebuah gerakan pemberontakan. Terakhir ialah faktor politik dimana pemerintah Jepang tidak memperhatikan bahkan menyingkirkan aturan-aturan politik tradisional dimana proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa tidak melibatkan rakyat.

Terdapat dua faktor utama penyebab meletusnya pemberontakan, yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung ialah perlakuan kasar penagih setoran kepada warga desa dan perilaku kekerasan aparat polisi ketika melakukan inspeksi ke desa Unra dalam rangka melakukan penagihan kewajiban setoran beras kepada warga, sebagaimana yang terjadi terhadap Ibanna. Perlakuan kasar penagih setoran dengan menaiki loteng dan membuka paksa bubungan rumah Ibanna untuk mengambil padi dan membuangnya ke tanah telah memicu kemarahan rakyat Unra. Tindakan ini juga telah melanggar norma adat-istiadat dan symbol-simbol budaya lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis, yaitu bahwa padi mengandung nilai magis dan tidak boleh dibuang ke tanah karena akan membuat petani sulit mendapatkan pangan atau gagal panen. Penyebab tidak langsungnya ialah adanya penetapan kewajiban setoran beras dari pemerintah pendudukan Jepang kepada

petani, yang kuotanya 500 liter per kepala rumah tangga.

Pemberontakan petani Unra pada tahun 1943 memperlihatkan berbagai persoalan penting yang dihadapi masyarakat pedesaan, pada masa pendudukan Jepang. Pemberontakan petani Unra harus dilihat sebagai ungkapan keresahan sosial sebagai dampak perubahan sosial yang cepat dan dipaksakan. Krisis ini menghancurkan jalinan moral masyarakat petani pada puncak kesulitan fisik yang mengancam subsistensi ekonomi mereka, sehingga membuat mereka menentang kekuasaan secara terbuka. Letak geografis Unra yang berada di daerah terpencil dalam wilayah kekuasaan kerajaan Bone dapat menjelaskan tradisi-tradisi mereka sebagai masyarakat dengan watak yang keras dan pembangkang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa, H. S. (1988). *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Gadjah Mada University Press.
- Carey, P., Suhardiyoto, H., & Sri, M. (2017). *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia dari Deandles (1808-1811) sampai Era Reformasi*. Komunitas Bambu.
- De Jong, L. (1987). *Pendudukan Jepang di Indonesia*. Kasaint Blanc.
- Geertz, C. (1966). *Agricultural Inovlution*. University of California Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation Of Cultures*.
- Hafid, A. (1997). *Pemberontakan Petani Allu (Laporan Penelitian)*. Balai Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hobsbawm, E. J. (1971). From Social History to the History of Society. *Daedalus*, 100(1), 20–45.
- Hobsbawm, E. J. (2018). *Bandit: Genealogi dan Struktur Sosial*. Antitesis.
- Kamaruddin, S. A. (2012). *Pemberontakan Petani UNRA 1943*. 16(1), 17.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Kurosawa, A. (2015). *Mobilisasi dan Kontrol: Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*. Komunitas Bambu.
- Limbu Gau, D. (1991). *Gerakan Protes UNRA: Suatu Gerakan Sosial di Pedalaman Agraris Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Nagazumi, A. (1998). *Pemberontakan di Indonesia pada Masa Jepang*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ningrum, R. K., Waluyo, H. J., & Winarni, R. (2017). Representation of Japanese Post-colonial Experience in the Year of 1942-1945 Based on Pramoedya Ananta Toer's Novel "Perburuan." *None*, 16(1), 105–117.
- Oktorino, N. (2016). *Di Bawah Matahari Terbit*. Elex Media Komputindo.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Serambi Ilmu.
- Soediono, M. P. T., & Gunawan, W. (1984). *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suharko. (2006). Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 1–23.
- Suryanegara, & Ahmad Mansur. (2010). *Api Sejarah 2*. Pustaka Semesta.
- Tom, B. (2005). The Journal of Peseant Studies: The Third Decade. *Journal of Peseant Studies*, 32(1), 153–241.
- Utami, S. M. (2011). Pengaruh Politik Pintu Terbuka Terhadap Masyarakat Pedesaan Di Jawa. *Paramita: Historical Studies Journal*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/paramita.v21i1.1025>
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University

Press.

Wolf, E. R. (1983). *Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*. CV Rajawali.

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.